

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indikator yang dipergunakan untuk dapat mengetahui kinerja perekonomian adalah melalui pertumbuhan ekonomi, baik itu di tingkat daerah maupun negara. Kenaikan atau penurunan pertumbuhan ekonomi akan menunjukkan apakah kinerja perekonomian di suatu negara atau daerah tersebut mengalami peningkatan atau penurunan. Menurut Todaro (2003) pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses di mana sepanjang waktu terdapat peningkatan volume produksi suatu perekonomian untuk menghasilkan pendapatan dengan tingkat yang besar.

Indikator yang dipergunakan dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi suatu negara yaitu Produk Domestik Bruto atau umum dikenal dengan *Gross Domestic Product* (GDP). Sedangkan tolak ukur yang dimanfaatkan dalam menghitung pertumbuhan ekonomi di suatu daerah yaitu PDRB. Kenaikan jumlah PDB atau PDRB dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa sepanjang waktu terjadi peningkatan kapasitas produksi dari suatu perekonomian. Peningkatan tersebut akan menghasilkan semakin besarnya tingkat pendapatan, sehingga dapat menjadikan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah atau negara meningkat.

Data yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik Provinsi Riau tahun 2020, dalam empat tahun terakhir pertumbuhan PDRB di Provinsi Riau mengalami fluktuasi. adalah sebesar 2,18%, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi 2,66%. Namun menurun menjadi 2,37% pada 2018, dan laju pertumbuhan PDRB di Provinsi Riau di akhir tahun 2019 kembali naik menjadi 2,84%. Dari data tersebut dapat diperoleh bahwa pertumbuhan PDRB di Provinsi Riau cenderung mengalami peningkatan, namun nilainya masih di bawah pertumbuhan PDRB rata-rata seluruh provinsi di Pulau Sumatera. Dimana pada tahun 2019 Provinsi Riau merupakan provinsi dengan pertumbuhan PDRB paling rendah di Pulau Sumatera. Provinsi Riau hanya mampu meningkatkan

pertumbuhan PDRB sebesar 2,84% sedangkan pertumbuhan PDRB Pulau Sumatera pada tahun 2019 adalah sebesar 4,57%.

Dari sajian data diatas dapat disimpulkan bahwa perekonomian di Provinsi Riau pada tahun 2016-2019 belum termasuk sukses, karena walaupun mengalami peningkatan pada nilai laju pertumbuhan PDRB, Provinsi Riau masih berada di bawah provinsi lainnya di Pulau Sumatera. Maka dari hal tersebut, perlu untuk pemerintah Provinsi Riau mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan nilai laju pertumbuhan PDRB masih rendah. Sukirno memaparkan, pengukuran taraf pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah melalui perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapainya. Berdasarkan teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik, dijelaskan bahwa faktor produksi yang dipengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya yakni: teknologi, modal, dan tenaga kerja (Rustiono dalam Maisaroh, 2016).

Tabel 1.1
Produk Domestik Regional Bruto menurut Propinsi di Sumatera
Berdasarkan Harga Konstan tahun 2016-2019

Provinsi	2016	2017	2018	2019
Aceh	116,374	121,240	126,824	132,087
Sumatera Utara	463,775	487,531	512,766	539,527
Sumatera Barat	148,134	155,984	164,034	172,321
Riau	458,769	470,984	482,158	495,846
Jambi	130,501	136,502	142,968	149,265
Sumatera Selatan	266,857	281,571	298,570	315,623
Bengkulu	40,074	42,074	44,171	46,362
Lampung	209,794	220,626	232,208	244,437
Kep.Bangka Belitung	47,848	49,986	52,215	53,951
Kep. Riau	162,853	166,082	173,684	182,184

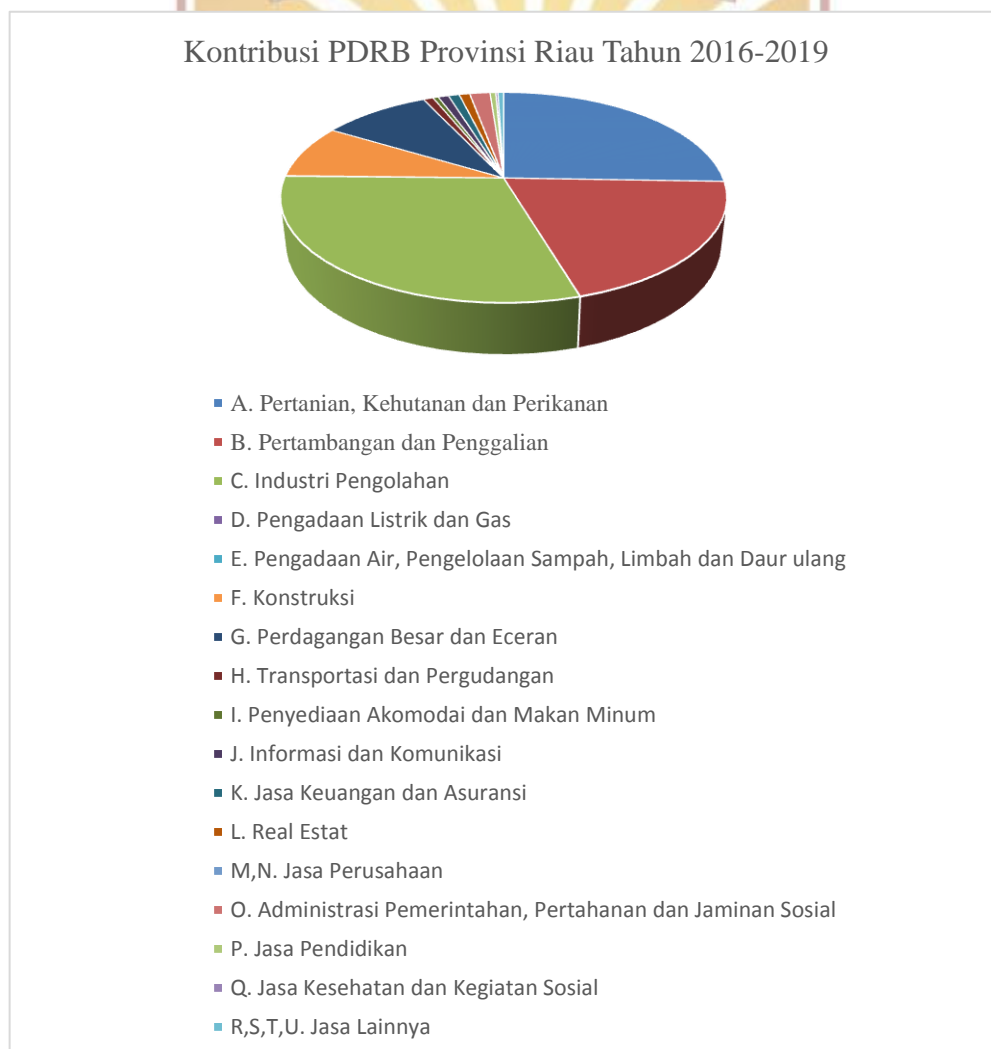
Sumber: Indonesia Dalam Angka 2020 (BPS), diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa PDRB Provinsi Riau cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 sampai tahun 2019, nilai PDRB Provinsi Riau berada di angka 458,769 miliar, 470,984 miliar, 482,158 miliar, 495,846 miliar. Dibalik nilai PDRB Provinsi Riau yang cenderung

meningkat, namun di balik nilai PDRB Provinsi Riau yang termasuk terbesar kedua di Pulau Sumatera, dari segi laju pertumbuhannya termasuk paling rendah yang hanya memiliki kenaikan rata-rata sebesar 2,50 % sedangkan rata-rata laju pertumbuhan PDRB Provinsi di pulau Sumatera sebesar 4,57% . Penurunan laju pertumbuhan PDRB Provinsi Riau dikarenakan dengan terjadinya gejolak harga minyak dunia yang membuat komoditas utama Provinsi Riau seperti minyak mentah dan kelapa sawit menjadi tidak stabil.

Gambar 1.1

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2016-2019



Sumber: Provinsi Riau Dalam Angka Tahun 2020 (BPS), diolah (2021)

Berdasarkan Gambar 1.1 diatas dapat dilihat lapangan usaha yang produksi sebagai penyumbang persentase terbesar terhadap PDRB Provinsi Riau Tahun 2016 sampai 2019 adalah sektor A, B dan C. Ketiga sektor tersebut berkontribusi lebih dari 50% dari total PDRB Provinsi Riau yang dapat dijabarkan yaitu sektor A sebesar 25,52%, sektor B sebesar 19,86% dan terakhir sektor C sebesar 29,89% dari Total keseluruhan PDRB. Selanjutnya sektor yang kontribusi terhadap PDRB yang termasuk rendah adalah sektor E,F dan M,N dengan kontribusinya 0,1%, dan dapat dijabarkan yaitu sektor E dan F keduanya sebesar 0,01 dari total PDRB di Provinsi Riau, yang terakhir sektor M,N sebesar 0,005% dari seluruh Total PDRB Provinsi Riau pada Tahun 2016-2019. Kontribusi PDRB atas lapangan usaha tersebut menggambarkan kondisi bagaimana fokus suatu daerah dalam peningkatan perekonomiannya.

Dalam meningkatkan pertumbuhan PDRB, pemerintah memiliki peranan penting. Salah satunya dengan mengalokasikan anggaran daerah dengan maksimal, sehingga dapat meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat. Alokasi yang dapat meningkatkan produktifitas masyarakat lebih diutamakan dibandingkan alokasi untuk kegiatan konsumsi. Karena dengan alokasi dana tersebut, bisa menjadikan pendapatan masyarakat meningkat, yang tentunya ini juga akan menjadikan pertumbuhan ekonomi meningkat pula.

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Provinsi Riau 2016-2019

Tahun	Penerimaan	Pengeluaran	Surplus/defisit
2016	6.942.926.673	8.731.938.149	-1789011476
2017	7.902.473.692	9.188.741.983	-1286268291
2018	8.478.991.024	8.469.560.058	9430966
2019	8.703.232.610	8.690.390.951	12841659

Sumber: Provinsi Riau Dalam Angka Tahun 2020 (BPS), diolah (2021)

Pada data yang didapatkan melalui Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Penerimaan dan pengeluaran Provinsi Riau 2016 sampai 2019 dimana pada 2016

mengalami peningkatan namun serta pada 2017 penerimaan Provinsi Riau mengalami defisit karena realisasi anggaran untuk belanja pemerintah lebih banyak. Total pendapatan pemerintah pada tahun 2016 sebesar Rp. 6.94 triliun dengan belanja pemerintah sebesar Rp. 8.73 triliun, dan penerimaan pemerintah pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 7.90 triliun dengan belanja pemerintah sebesar 9.18 triliun. Sehingga defisit pada tahun 2016 dan 2017 secara berturut adalah sebesar Rp. 1.78 triliun dan Rp. 1.28 triliun. Namun pada tahun 2018 dan 2019 penerimaan Provinsi Riau mulai meningkat dan membaik. Dimana pada tahun 2018 dan 2019, pendapatan pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp.8.47 triliun dan Rp.8.70 triliun, dengan total belanja pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2018 dan 2019 adalah Rp. 8.46 triliun dan Rp. 8.69 triliun. Sehingga pada tahun 2018 dan 2019 keuangan Riau mengalami surplus sebesar Rp. 9.4 miliar dan Rp.12.84 miliar.

Analisis penyebab naik turunnya Penerimaan daerah dikarenakan penurunan produksi minyak dan juga disebabkan turunnya dana bagi hasil yang menyebabkan kemampuan finansial di beberapa daerah di Provinsi Riau. Menurut data Kemenkeu tahun 2019, 10 daerah penerimaan DBH (Dana Bagi Hasil) migas di tahun 2018 sebanyak 8 kabupaten berasal dari Provinsi Riau. Daerah itu meliputi Bengkalis (Rp.803 miliar), kabupaten Siak (Rp.404 miliar), kabupaten Kampar (Rp.354 miliar), kabupaten Rokan Hulu (Rp.153 miliar), kabupaten Pelalawan (Rp.151 miliar), kabupaten Kepulauan Meranti (Rp.150 miliar), kabupaten Indragiri Hulu (Rp.150 miliar). Realisasi belanja tidak langsung pemerintah Provinsi Riau sepanjang tahun 2016-2019 didominasi oleh belanja pegawai. Berdasarkan data bahwa belanja pegawai tertinggi berada pada tahun 2019 yaitu sebesar 2.29 triliun rupiah. Pada realisasi belanja langsung Provinsi Riau didominasi oleh belanja barang dan jasa. Tercatat angka tertinggi juga berada pada tahun 2019 yang sebesar 2.23 triliun rupiah.

Dari pembahasan di atas, realisasi belanja pemerintah daerah Provinsi Riau diatas, terlihat bahwa secara umum pengeluaran pemerintah Provinsi Riau masih didominasi oleh pengeluaran yang bersifat konsumtif. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah masih belum optimal dalam meningkatkan produktivitas masyarakat. Sehingga belanja yang cukup besar

belum mampu dimaksimalkan untuk mencapai pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1.3

Jumlah Tenaga Kerja Provinsi Riau Tahun 2016-2019

Tahun	Tenaga Kerja (jiwa)
2016	2.987.952
2017	2.965.585
2018	3.108.398
2019	3.186.222

Sumber: Provinsi Riau Dalam Angka Tahun 2020 (BPS), diolah (2021)

Pertumbuhan PDRB suatu negara atau wilayah selain dipengaruhi faktor pengeluaran pemerintah juga dipengaruhi tenaga kerja. Banyaknya penggunaan tenaga kerja dapat mempengaruhi output yang dihasilkan yang akibatnya akan mempengaruhi ekonomi suatu negara atau wilayah tersebut. Data yang didapat melalui BPS (2019), bahwa selama 4 tahun terakhir jumlah angkatan kerja di Provinsi Riau mengalami pertambahan atau kenaikan. Pada tahun 2016, jumlah angkatan kerja di Provinsi Riau berjumlah 2.987.952 jiwa, tahun 2017 sebanyak 2.965.585 jiwa, 2018 3.108.398 jiwa, dan tahun 2019 mencapai angka 3.186.222 jiwa. Selain jumlah angkatan kerja yang meningkat tiap tahun, selama 4 tahun terakhir juga terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Riau. Pada tahun 2016 pengangguran terbuka Provinsi Riau tercatat sebesar 7,43%, lalu turun pada tahun 2017 ke angka 6,22%, tahun 2018 pengangguran terbuka sebesar 5,34% hingga pada tahun 2019 menyentuh angka 5,97%.

Data diatas dapat memperlihatkan bahwa tenaga kerja di Provinsi Riau makin membaik, namun hal tersebut belum bisa membuat PDRB Provinsi Riau terhitung tinggi di Pulau Sumatera. Hal ini ditunjukkan dimana pada tahun 2019 Provinsi Riau masih Provinsi dengan pertumbuhan PDRB terendah di Pulau Sumatera. Sehingga pemerintah perlu mengidentifikasi penyebab tenaga kerja yang semakin membaik belum diiringi pertumbuhan PDRB di Provinsi Riau yang stabil dan baik tinggi seperti provinsi lain di Pulau Sumatera.

Menurut pernyataan teori pertumbuhan neo klasik, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh teknologi. Teknologi membantu mempermudah kegiatan masyarakat termasuk produksi. Dengan adanya peningkatan teknologi maka akan meningkatkan jumlah produksi yang dihasilkan, sehingga dapat menjadikan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat meningkat. Salah satu teknologi yang selalu digunakan pada dekade ini adalah pengguna internet atau teknologi internet. Era Revolusi Industri 4.0 sekarang ini berpotensi untuk meningkatkan kinerja industri dengan inovasi guna mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang akan berdampak dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data dari BPS, pengguna internet di Provinsi Riau dari tahun ke tahun meningkat yaitu 25,90% pada 2016 yang didominasi oleh daerah perkotaan sebesar 41,08% lalu naik pada tahun 2017 ke angka 32,16% dan masih didominasi di daerah perkotaan, dan pada tahun 2018 kembali naik ke angka 39,98% dan didominasi perkotaan sebesar 53,64%.

Berdasarkan penjelasan data tersebut, bisa diketahui adanya peningkatan pertumbuhan PDRB di Provinsi Riau namun masih terbelang terendah di antara provinsi-provinsi lain di Pulau Sumatera. Realisasi Belanja Provinsi Riau cenderung terjadi peningkatan di tahun 2018 dan 2019 terjadi surplus. Kondisi tersebut dikarenakan lebih banyak pengeluaran yang tidak bersifat produktif, oleh karenanya didapat kesimpulan bahwa pemerintah Provinsi Riau meskipun dengan belanja yang besar belum dapat mengantarkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau menjadi terbaik di Pulau Sumatera. Selain itu, meskipun tenaga kerja di Provinsi Riau membaik dan jumlah pengguna internet yang digunakan makin meningkat, namun peningkatan indikator-indikator tersebut belum bisa meningkatkan pertumbuhan PDRB di Provinsi Riau mencapai nilai yang baik. Dimana pada tahun 2019, Provinsi Riau menjadi provinsi dengan pertumbuhan PDRB terendah di Pulau Sumatera. Maka dari hal tersebut, perlu diteliti apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB di Provinsi Riau dan apa yang harus ditingkatkan agar PDRB di Provinsi Riau menjadi maksimal dan tidak menjadi rendah di Pulau Sumatera. Sehingga, penulis menjadikan “**Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja dan Pengguna Internet Terhadap PDRB Provinsi Riau Tahun 2016-2019**” sebagai judul penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada penjabaran latar belakang, maka agar lebih sesuai serta terarah akan tujuan yang dicapai, peneliti merumuskan masalah yang meliputi:

1. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB di Provinsi Riau?
2. Bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap PDRB di Provinsi Riau?
3. Bagaimana pengaruh pengguna internet terhadap PDRB di Provinsi Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB di Provinsi Riau.
2. Untuk menganalisis pengaruh tenaga kerja terhadap PDRB di Provinsi Riau.
3. Untuk menganalisis pengaruh pengguna internet terhadap PDRB di Provinsi Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

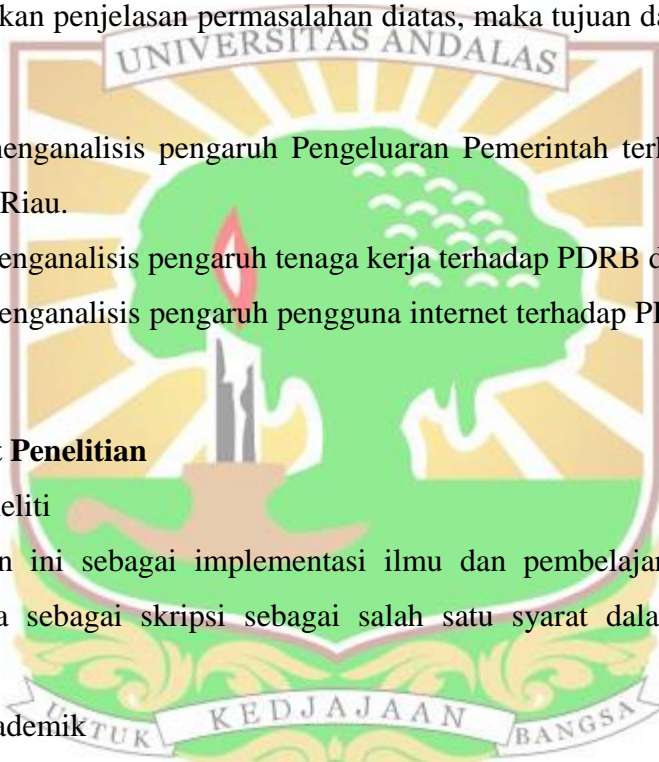
Penelitian ini sebagai implementasi ilmu dan pembelajaran yang sudah ditempuh serta sebagai skripsi sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian pendidikan S1.

2. Bagi Akademik

Diharapkan melalui penelitian ini bisa memberi kontribusi pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan dijadikan rujukan penelitian berikutnya tentang pengaruh Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja dan Pengguna Internet Terhadap PDRB di Provinsi Riau.

3. Bagi Pemerintah

Diharapkan melalui penelitian ini semoga bisa membantu pemerintah dalam usaha meningkatkan pertumbuhan dan permasalahan PDRB di Provinsi Riau untuk tahun mendatang.



1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Topik bahasan penelitian ini yaitu pengaruh antara variabel tergantung dan variabel bebas. Variabel tergantungnya yaitu PDRB Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau dengan PDRB atas dasar harga konstan sebagai pengukurannya. Sementara variabel bebasnya yaitu Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang diamati dari sisi realisasi belanja daerah. Variabel independen selanjutnya adalah variabel tenaga kerja, dimana data yang dipakai yaitu tenaga kerja yang telah berumur 15 tahun keatas dan sedang bekerja. Dan variabel independen terakhir yaitu variabel pengguna internet berdasarkan total keseluruhan penduduk yang mengakses internet di Kabupaten/Kota pada Provinsi Riau dengan usia 5 tahun ke atas. Untuk data yang dipergunakan adalah data empat tahun yaitu sepanjang tahun 2016 – 2019 dengan lokasi penelitian Kabupaten Kota di Provinsi Riau serta memanfaatkan metode OLS (Ordinary Least Square).

1.6 Sistematika Penulisan

Uraian terkait sistematika penulisan adalah penjabaran secara singkat mengenai isi dari pembahasan, dimana tujuannya guna mempermudah pembaca dalam mengikuti alur pembahasan dari penulisan skripsi ini. Penjabaran sistematik penulisan ini, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Merupakan penjelasan menyangkut latar belakang permasalahan, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Memperlihatkan acuan teori dalam penelitian yang termasuk landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta dengan hipotesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Memperlihatkan acuan teori dalam penelitian dalam penelitian yang termasuk landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta diakhiri dengan hipotesis penelitian.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini akan membahas dan menguraikan terkait deskripsi variabel serta menerangkan jawaban dari rumusan permasalahan, uji hipotesis, serta hasil penjabaran penelitian yang dilakukan.

BAB V Penutup

Bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian dan saran dari hasil penelitian yang diperoleh, yang nantinya saran tersebut diharapkan bisa bermanfaat untuk seluruh pihak.

